

OPEN ACCESS

Citation: Arifin, B & Ashari, DW. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia: Masa Normal dan Masa Pandemi Covid-19 (2020-2022). *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1), 85-99

Received: April 1, 2023
Revised: June 14, 2023
Accepted: June 16, 2023
Published: June 2023

© The Author(s)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Artikel

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN SURAT BERTHARGA NEGARA (SBN) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN INDONESIA: MASA NORMAL DAN MASA PANDEMI COVID-19 (2020-2022)

Analysis of The Effect of Government Bonds (SBN) Financing on Indonesia's Poverty Level): at The Time of Normal and at The Time of The Covid-19 Pandemic (2020-2022)

Badrul Arifin¹⁾ & Dimas Wisnu Ashari²⁾

¹⁾Komisi XI DPR RI & ²⁾DNVB Institute

email: badrularifin5@gmail.com & dimaswisnu36@gmail.com

Abstract

When the country is experiencing a fiscal deficit, especially during a crisis, the issuance of government bonds is considered a necessity, predominantly to finance productive sectors. This paper aims to analyze the effect of financing originating from Government Bonds (SBN) on poverty levels in Indonesia. The analysis is carried out over a period from normal times (2012-2019) to the Covid-19 pandemic crisis (2020-2022). The method of this study is explanatory research through a quantitative approach and multiple linear regression in this study using SPSS 25. The findings from this study are that there has been an increase in SBN and government allocation on social assistance spending. Generally, social assistance policies have also proven effective in reducing the percentage of poverty in the entire community, especially rural communities, yet have not been able to reduce urban poverty. Meanwhile, at the time of Covid 19 Pandemic, the increase of SBN cannot automatically eradicate poverty, as the social assistance budget does not have a significant effect on the percentage of poverty in urban areas.

Keywords: SBN, pandemic, poverty

JEL Classifications: E62; H12; H63; I32; I38.

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan yang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis dilakukan dengan rentang waktu pada masa normal (tahun 2012-2019) sampai masa krisis pandemi Covid-19 (tahun 2020-2022). Pertama, penelitian ini akan dimulai dari latar belakang mengenai kecenderungan pemerintah Indonesia yang banyak menerbitkan SBN sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk menutupi defisit APBN akibat tingginya belanja dibandingkan pendapatan negara, termasuk anggaran yang dialokasikan ke beberapa program di masa pandemi, diantaranya program jaring pengaman sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Penerbitan SBN secara masif dianggap wajar mengingat kondisi keuangan suatu negara dalam hal ini penerimaan negara selalu lebih kecil dibandingkan belanja negara. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya defisit pada ruang fiskal tersebut, pemerintah dapat mencari sumber pembiayaan lain yang bisa dimanfaatkan.

Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka mengenai kajian terdahulu yang terkait dengan SBN dan tingkat kemiskinan, lalu dilanjutkan dengan penjelasan metode yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun pada bagian hasil dan pembahasan akan dijelaskan seberapa signifikan pengaruh SBN terhadap tingkat kemiskinan Indonesia yang mencakup periode normal dan periode pandemi Covid-19. Terakhir, pada bagian kesimpulan akan dijelaskan rangkuman sekaligus rekomendasi dari penelitian ini.

Menurut studi Hutaria et al. (2021), pasca krisis moneter pada tahun 1998, instrumen utang yang mendominasi pembiayaan defisit anggaran di Indonesia adalah melalui penerbitan SBN. Hal ini dilakukan salah satunya guna mendukung percepatan pembangunan nasional. Dibandingkan dengan skema utang lainnya, pembiayaan melalui SBN memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah risiko nilai tukar yang lebih kecil dibandingkan utang luar negeri. Selain itu, penerbitan SBN dapat memungkinkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam membantu pembangunan perekonomian negara melalui pembelian SBN. SBN sendiri merupakan instrumen pembiayaan yang sangat dominan dibandingkan dengan instrumen lainnya. SBN juga merupakan bagian dari utang pemerintah yang harus dibayar kembali di masa yang akan datang pada jangka waktu yang telah ditentukan (Juanda dan Gladiola, 2022). Oleh karena itu, dana pembiayaan yang diperoleh melalui SBN haruslah dialokasikan ke berbagai program produktif.

Khusus di masa krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 di mana terjadi perlambatan perekonomian, akan secara otomatis menurunkan penerimaan negara. Akibat penurunan penerimaan negara yang signifikan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan dan respons luar biasa untuk menstabilkan keuangan negara. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang untuk membantu mengurangi dampak pandemi.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah diberikan kelonggaran dalam mengalokasikan APBN dengan defisit lebih dari 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga tahun anggaran

Analisis Pengaruh Pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia: Masa Normal dan Masa Pandemi Covid-19 (2020-2022)

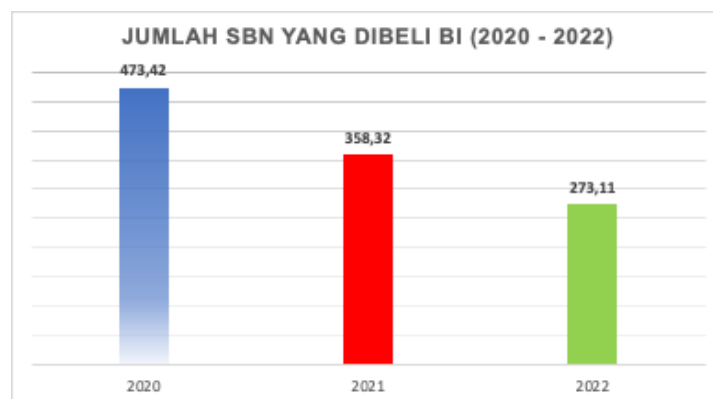
2022, serta *one off policy* berupa keleluasaan untuk menerbitkan SBN sebagai sumber pembiayaan program-program penanggulangan dampak pandemi Covid-19 termasuk program penguatan jaring keamanan sosial dan merancang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu pemulihan perekonomian nasional dan mencegah terjadinya lonjakan angka kemiskinan di tengah krisis yang disebabkan oleh pandemi. Akan tetapi, UU ini menetapkan bahwa rasio utang Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen dari PDB. Hal ini bertujuan untuk membatasi jumlah utang yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi beban yang terlalu besar pada perekonomian Indonesia.

SBN sebagai salah satu instrumen pembiayaan telah berfungsi untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal kita yang defisit akibat berkurangnya penerimaan negara karena melemahnya aktivitas ekonomi. SBN juga berhasil membantu meningkatkan porsi anggaran untuk program PEN termasuk belanja-belanja yang bertujuan untuk membantu menekan angka kemiskinan. Periode tahun 2020-2022, total pembiayaan utang yang diperoleh melalui penerbitan SBN adalah mencapai Rp2.788,6 triliun dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pencapaian Pemenuhan Pembiayaan Utang
Sumber: DJPPR Kemenkeu, 2023

Realisasi tersebut dapat dengan sukses dipenuhi salah satunya berkat adanya sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang sangat baik. UU Nomor 2 tahun 2020 memungkinkan BI sebagai bank sentral dapat membeli SBN pemerintah di pasar perdana pada masa krisis, sehingga membuat SBN pemerintah dapat langsung diserap oleh BI. Gambar 2 di bawah merupakan ilustrasi dari tren pembelian SBN oleh BI.



Gambar 2. Jumlah SBN yang Dibeli BI
Sumber: Bank Indonesia, 2023, diolah

Selama tiga tahun terakhir, jumlah SBN yang dibeli oleh BI mengalami penurunan, meskipun demikian angka tersebut masih relatif tinggi. Secara keseluruhan, pembelian SBN oleh BI untuk pembiayaan APBN selama kurun tahun 2020-2022 atas dasar UU Nomor 2 Tahun 2020 adalah berjumlah Rp1.104,85 triliun. Tentunya angka pembiayaan utang yang besar ini yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini apakah benar-benar efektif dikelola dengan baik untuk program pemulihan ekonomi nasional, terutama di masa pandemi Covid-19 dan punya dampak terhadap penurunan angka kemiskinan Indonesia.

Sebagai salah satu isu krusial mana kala krisis akibat pandemi Covid-19 melanda, fenomena kemiskinan layak dikaji mengingat telah dilakukan sebuah simulasi cepat yang mencakup 138 negara berkembang dan 26 negara dengan ekonomi berpenghasilan tinggi menemukan bahwa bahkan dalam skenario yang paling ringan sekalipun, Covid-19 dapat membuat 85 juta orang jatuh miskin (Sumner et al., 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan fokus menjawab pertanyaan berikut: apakah terdapat pengaruh SBN terhadap angka kemiskinan Indonesia dengan anggaran bantuan sosial (bansos) sebagai mediasi? Adapun, penulis membatasi penelitian ini hanya sebatas realisasi SBN di masa normal sampai masa pandemi (tahun 2012-2022), sementara angka persentase kemiskinan yang dijadikan objek analisis adalah periode tahun 2012–2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peningkatan SBN terhadap angka kemiskinan Indonesia di masa pandemi serta dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah agar pengelolaan utang negara dapat lebih *prudent* dan efektif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Surat Berharga Negara (SBN) dan Pertumbuhan Ekonomi

SBN merupakan bagian dari instrumen pembiayaan APBN yang termasuk dalam utang pemerintah pusat dan pembayaran bunga serta pokoknya dijamin oleh negara Republik Indonesia. Pembayaran pokok dan bunga dari SBN disesuaikan dengan masa berlaku dan tenggat waktu jatuh tempo dari masing-masing jenis SBN. SBN terdiri dari dua kategori utama, yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang pengelolaannya diatur oleh Undang-Undang yang berbeda. Pengelolaan SUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (UU SUN). Sedangkan pengelolaan SBSN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN). Tujuan penerbitan SBN mencakup pembiayaan defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek, dan mengelola portofolio utang negara (Pasal 5 UU SUN). SBN diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dengan persetujuan DPR setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Selain itu, SBN juga memiliki manfaat sebagai instrumen fiskal, investasi, dan pasar keuangan.

SBN memiliki peran yang sangat penting dalam komposisi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi pada masa pandemi Covid-19, SBN memainkan peran yang krusial sebagai tambahan pembiayaan negara untuk biaya sosial. Pemerintah Indonesia menerbitkan Obligasi Negara Ritel Seri ORI019 pada Juni 2020 dengan nilai yang mencapai Rp22 triliun, yang kemudian digunakan untuk membiayai program Bantuan Sosial Tunai (BST). ORI019 merupakan obligasi ritel yang diterbitkan oleh pemerintah dan dijual kepada individu atau masyarakat umum dengan harga yang terjangkau. Salah satu contoh penggunaan SBN untuk bantuan sosial adalah program BST yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020. Program ini bertujuan untuk

membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan memberikan bantuan tunai sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan SUN dan obligasi pemerintah untuk membiayai program-program bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19, seperti program subsidi gaji bagi pekerja, bantuan modal usaha, dan bantuan sosial non-tunai.

Beberapa studi terdahulu telah menunjukkan bahwa hubungan antara kenaikan SBN dengan pertumbuhan ekonomi cukup beragam, studi yang dilakukan Ryandini (2014) dalam penelitiannya tentang pengaruh investasi melalui instrumen SUN dan SBSN terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia memberikan hasil analisis yang menunjukkan bahwa kenaikan investasi melalui SUN akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu, Asteriou et al. (2021) melakukan penelitian yang berjudul *Public Debt and Economic Growth: Panel Data Evidence for Asian Countries*. Penelitian ini menguji hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara utang pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi pada data panel yang diambil dari beberapa negara di Asia pada periode tahun 1980-2012. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kenaikan utang pemerintah pusat dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang maupun pendek. Maka dari itu, penggunaan SBN perlu diperhatikan dalam konteks anggaran pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan SBN tidak mengganggu stabilitas fiskal jangka panjang, dan perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana bantuan sosial secara transparan dan akuntabel (Juanda dan Gladiola, 2022). Kehati-hatian tersebut seperti yang ditulis oleh Burnside (2005) yang menyebut bahwa keberlanjutan fiskal memiliki pengertian jika sebuah negara memiliki kemampuan untuk mempertahankan kebijakan-kebijakan fiskalnya secara terus-menerus dengan tetap menjaga posisi keuangannya dalam keadaan *solvent*.

Tidak sedikit negara yang mengalami kesulitan ruang fiskal karena urusan utang, misalnya Jepang dan Yunani. Salah satu contoh dampak obligasi negara terhadap belanja sosial terjadi di Jepang. Pada tahun 1990-an, Jepang mengalami stagnasi ekonomi yang berkepanjangan, dan pemerintah menerbitkan obligasi negara dalam jumlah yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, beban utang pemerintah tumbuh lebih dari dua kali ukuran PDB Jepang dan akibatnya belanja sosial dibatasi. Di mana ini termasuk pemotongan untuk perawatan kesehatan, pensiun, dan program kesejahteraan sosial lainnya (Fournier et al., 2020)

Contoh lain adalah kasus di Yunani yang menghadapi krisis utang negara pada tahun 2010. Pemerintah Yunani kala itu sangat bergantung pada obligasi negara untuk membiayai pengeluarannya. Ketika suku bunga obligasi ini melonjak, pemerintah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Hal ini menyebabkan langkah-langkah penghematan yang parah, termasuk pemotongan belanja sosial dan pengurangan layanan pemerintah (Ardagna dan Caselli, 2014).

Maka dari itu, agar pengelolaan utang dilakukan dengan bijak dan *prudent*, harus memperhatikan pengukuran tingkat kerentanan fiskal sebagai alat analisis dengan didasarkan beberapa indikator yang merujuk pada hasil kajian Dufrénot et al. (2016) sebagai berikut: (i) *debt service ratio to income*, (ii) *interest ratio to income*, (iii) *debt ratio to GDP*, dan (iv) *debt ratio to income*. Indikator-indikator tersebut dapat dijadikan rujukan untuk mengidentifikasi apakah tekanan terhadap fiskal meningkat atau menurun. Apabila indikator

kerentanan fiskal trennya meningkat, maka hal ini menunjukkan risikonya meningkat. Sebaliknya, apabila indikator kerentanan fiskal menunjukkan penurunan, hal tersebut mengindikasikan bahwa risiko fiskal menurun.

2. Kemiskinan di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah berkembang menjadi salah satu masalah kemanusiaan terbesar dalam catatan sejarah. Penelitian World Bank (2021) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 saja, sebanyak 97 juta lebih orang jatuh miskin akibat Covid-19. Hampir tidak ada aspek mata pencaharian dan pekerjaan yang tidak diganggu oleh Covid-19. Pandemi telah mengganggu setiap area sistem perawatan kesehatan di seluruh dunia dan berdampak sangat buruk pada keluarga rentan, utamanya bagi wanita dan anak-anak. Pandemi Covid-19 berdampak lebih dalam pada kemiskinan. Mengingat ketidakpastian seputar masa depan pandemi dan ekonomi global, Covid-19 meningkatkan jumlah orang yang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan. Lebih lanjut Sumner et al. (2021) menyimulasikan evolusi kemiskinan di negara-negara berkembang dengan mempertimbangkan ketidakpastian seputar pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas serta faktor spesifik negara seperti distribusi pendapatan.

Guncangan Covid-19 secara permanen meningkatkan kerentanan kemiskinan karena ketidakpastian yang cukup besar tentang prospek global di masa depan. Efek jangka pendek dan jangka panjang dari pandemi yang diukur dengan kontrafaktual Covid-19 menunjukkan peningkatan jumlah orang yang berisiko menjadi miskin sebanyak 40 dan 107 juta orang pada tahun 2021 dan 2030, menggunakan garis kemiskinan USD1,90 (Sumner et al., 2021).

Untuk kasus di Indonesia, berdasarkan data BPS (2022) tingkat kemiskinan per September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54 persen) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71 persen). Meskipun demikian, menurut riset yang dilakukan oleh SMERU (2021) tingkat kesejahteraan sebagian besar rumah tangga di Indonesia menurun selama krisis akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, peningkatan program bantuan sosial dapat mengurangi beban rumah tangga selama krisis akibat pandemi Covid-19.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Data dalam penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa variabel. Data realisasi pembiayaan utang yang berasal dari SBN sebagai variabel independen (variabel X), realisasi belanja bantuan sosial sebagai variabel mediasi, dan variabel persentase kemiskinan sebagai variabel Y. Sumber data penelitian ini diperoleh dari Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia. Data yang diambil dimulai dari periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan penelitian kausal (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian kausal, variabel independen sebagai variabel sebab (variabel X) dan variabel dependen sebagai variabel akibat atau variabel tak bebas (variabel Y). Selain variabel X dan variabel Y, terdapat pula variabel mediasi atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel X dan memengaruhi variabel Y.

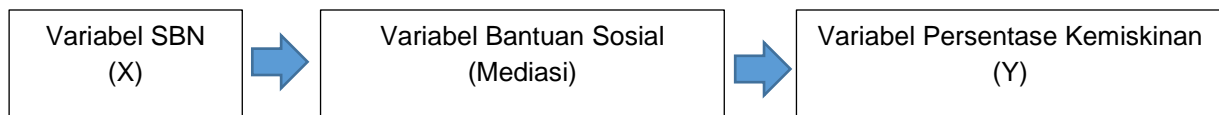
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda. Variabel

independennya adalah jumlah SBN; variabel dependennya adalah jumlah alokasi bantuan sosial; dan variabel kontrolnya adalah penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Aplikasi yang dipakai untuk melakukan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah SPSS 25.

Beberapa referensi yang menjadi acuan model yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal, seperti yang ditulis oleh Normasyhuri et al., (2022). Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa surat utang negara digunakan untuk memenuhi bantuan sosial bagi masyarakat saat krisis pandemi tiba. Sementara hubungan antara variabel bantuan sosial dan tingkat kemiskinan banyak diteliti, namun masih pada level provinsi atau kabupaten kota. Hasil penelitian juga masih terbagi, misalnya Melati et al., (2021) menyebut anggaran bantuan sosial tidak memiliki pengaruh signifikan pada persentase kemiskinan di Jawa Barat. Sementara Sinaga et al., (2022) menyebutkan anggaran bantuan sosial memberi pengaruh pada persentase kemiskinan di Sumatera Utara. Dengan referensi tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini ada dua, yaitu:

Hipotesis 1: Terdapat pengaruh searah yang signifikan antara jumlah SBN terhadap anggaran bantuan sosial.

Hipotesis 2: Terdapat pengaruh berbalik yang signifikan antara jumlah anggaran bantuan sosial terhadap persentase kemiskinan di Indonesia.

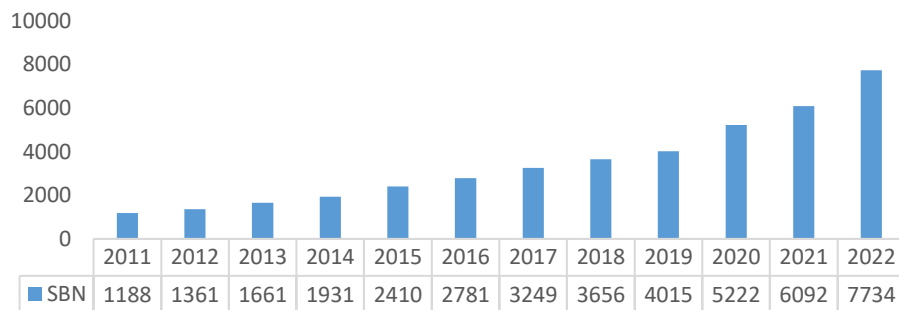


Gambar 3. Bagan Kerangka Berpikir

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) (2023), selama 12 tahun ke belakang, SBN menunjukkan tren peningkatan. Adapun dana yang terkumpul dari investor mencapai kenaikan yang signifikan, yaitu dari hanya Rp1.188 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp7.734 triliun pada tahun 2022. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada masa pandemi, yaitu pada tahun 2020 dan 2022, yaitu berkisar belasan persen per tahun (Gambar 4).

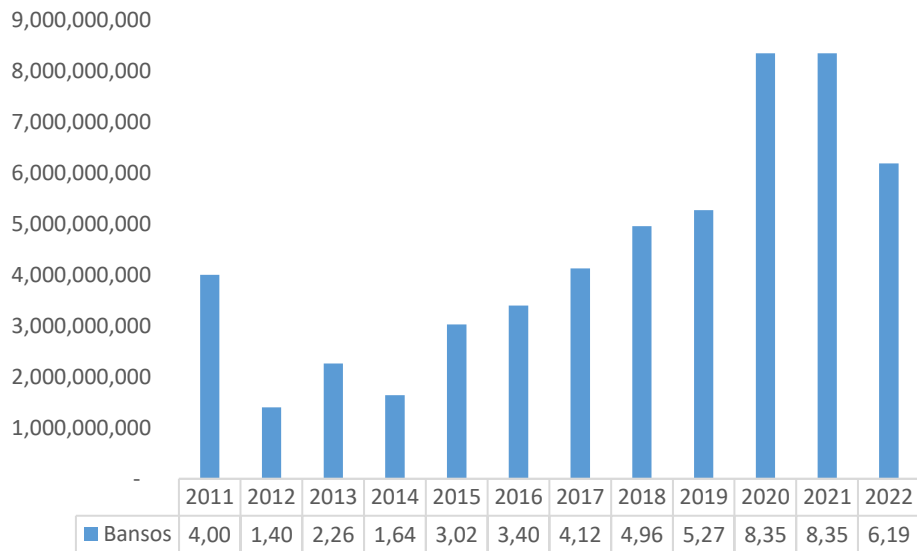


Gambar 4. SBN Tahun 2011-2022 (Triliun Rp)

Sumber: DJPPR, 2023 diolah.

Tren yang sama seperti SBN, konsisten naik, terjadi juga pada anggaran bantuan sosial pemerintah. Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran

pemerintah untuk belanja bantuan sosial mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Tren peningkatan tersebut dapat dilihat dari angka pengeluaran belanja bantuan sosial yang jumlahnya hanya Rp1,4 triliun pada tahun 2012 hingga pada tahun 2022 jumlahnya sudah lebih dari Rp8 triliun. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 atau saat terjadi krisis pandemi Covid-19, yaitu pada kurun tahun 2020-2022.



Gambar 5. Anggaran Bantuan Sosial 2014-2022 (Rp Triliun)

Sumber: BPS, 2023, diolah

Perbedaan antara kondisi normal dengan kondisi pandemi memang terlihat dalam komposisi anggaran APBN Indonesia. Pada bagian bantuan sosial, jumlah anggaran di masa normal hanya menghabiskan Rp3,3 triliun saja. Akan tetapi pada masa krisis, nilai anggaran bansos naik lebih dari dua kali lipat menjadi Rp7,6 triliun. Sementara pada sisi SBN, nilai kenaikannya juga sangat signifikan, yaitu dari Rp2.472 triliun menjadi Rp6.349 triliun. Kenaikan anggaran bansos dan SBN ini sama-sama lebih dari dua kali lipat dan lebih besar dibanding penerimaan negara dari pajak atau bukan pajak yang dari persentase maupun signifikansi di bawah SBN dan bansos (Tabel 1).

Tabel 1. Perbedaan antara Angka Bantuan Sosial (BS), SBN, Penerimaan Negara Pajak (PNP), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kondisi Normal dan Pandemi

Pos Anggaran	Kondisi	N	Rata-rata (Triliun Rp)	Sig.
BS	Kondisi Normal	9	3,35	0,001
	Kondisi Pandemi	3	7,63	
SBN	Kondisi Normal	9	2.472	0
	Kondisi Pandemi	3	6.349	
PNP	Kondisi Normal	9	1.223	0,055
	Kondisi Pandemi	3	1.586	
PNBP	Kondisi Normal	9	3.426	0,052
	Kondisi Pandemi	3	4.377	

Sumber: BPS, 2023, diolah

2. Pengaruh SBN pada Bantuan Sosial

Hubungan kausalitas antara SBN terhadap pengeluaran bantuan sosial pemerintah dapat diketahui dengan melakukan analisis regresi linear. Hasil regresi linier berganda yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kenaikan SBN terhadap anggaran bansos memiliki pengaruh yang signifikan positif atau bersifat *direct relationship*. Artinya, jika angka SBN naik maka angka bantuan sosial juga naik. Pengujian ini menjawab hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini bahwa ada pengaruh kenaikan SBN terhadap angka bansos. Derajat signifikansi SBN yang signifikan tersebut berada di bawah satu persen (0,4 persen), lalu diikuti oleh variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu variabel Penerimaan Negara dari Pajak/PNP (9,7 persen), akan tetapi tidak diikuti oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP (52,7 persen) (Tabel 2).

Tabel 2. Hasil Regresi Linier Berganda

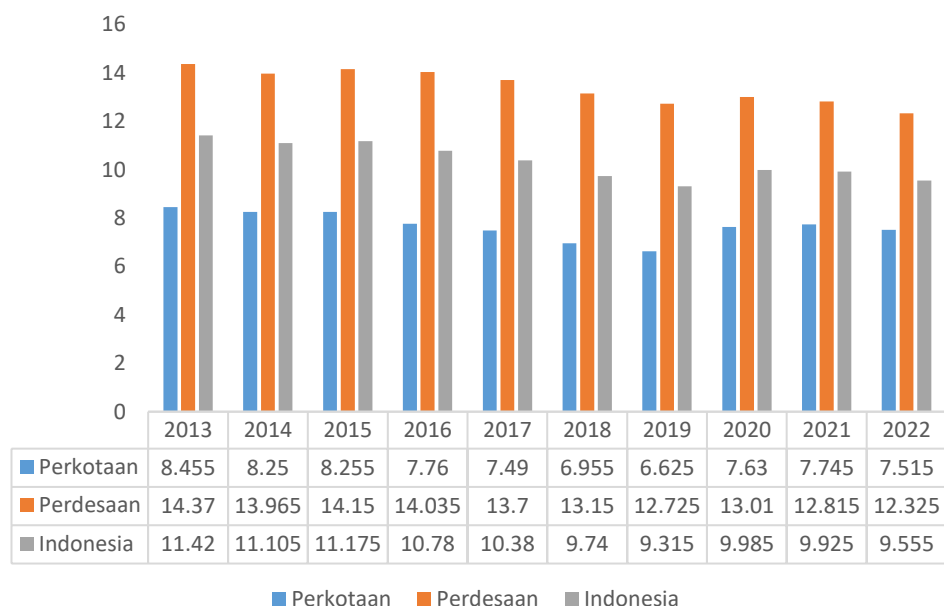
Variabel	T	Sig
Konstanta	1.811	0.113
SBN	6.214	0.004
PNP	-2.127	0.097
PNBP	-0.19	0.527

Sumber: DJPPR dan BPS, 2023, diolah

Pengaruh SBN yang signifikan terhadap pengeluaran bantuan sosial tidak lepas dari kondisi pandemi yang memaksa pemerintah melakukan aneka kebijakan sosial untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi kesusahan (Hanoatubun, 2020). Kebijakan sosial diperlukan oleh pemerintah pada waktu itu karena kondisi masyarakat yang mengalami keterbatasan aktivitas ekonomi, apalagi untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan (Barrientos, 2011). Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dan baru pulih pada tahun 2021. Pertumbuhan pada tahun 2021 juga belum memuaskan, sebab pertumbuhan hanya terjadi dengan persentase 3 persen atau di bawah 5 persen. Pertumbuhan ekonomi kembali mencapai angka 5 persen setelah tahun 2022, seiring dengan menurunnya efek negatif pandemi Covid-19.

3. Pengaruh Pengeluaran Bantuan Sosial pada Persentase Kemiskinan

Pendapatan negara dari SBN dapat dihubungkan dengan pengentasan kemiskinan masyarakat (Junaedi, 2018), salah satunya melalui perantara anggaran bantuan sosial yang dianggarkan oleh pemerintah (Mi, 2008). Sebab, anggaran pemerintah dalam APBN yang tujuannya spesifik mengentaskan kemiskinan adalah anggaran bantuan sosial. Peran anggaran bantuan sosial semakin terasa relevansinya saat masa krisis pandemi Covid-19. Pada masa Covid-19, angka kemiskinan mengalami kenaikan kembali setelah pada tahun 2018 dan 2019 angkanya menurun. Dari segi persentase, persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi dalam sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan Gambar 6, fluktuasi terjadi terutama ketika ada fenomena krisis akibat pandemi Covid-19. Padahal, tren persentase kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan yang konsisten dari 2013 sampai 2019. Secara lebih rinci, tren penurunan terjadi di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Saat pandemi terjadi, angka persentase kemiskinan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama di wilayah kota.



Gambar 6. Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan, Pedesaan, dan Seluruh Indonesia

Sumber: BPS, 2022 diolah.

Pengaruh surat berharga negara pada anggaran bansos sudah terbukti memiliki hubungan yang signifikan positif. Setelah itu, perlu diketahui pengaruh antara anggaran bansos terhadap persentase kemiskinan di Indonesia. Hasil uji pengaruh antara anggaran bansos dan persentase kemiskinan dilakukan dengan regresi linier sederhana atau hanya memakai variabel X dan variabel Y saja, tanpa variabel kontrol. Hasil uji pengaruh menunjukkan bahwa anggaran bantuan sosial berpengaruh signifikan negatif pada persentase kemiskinan di Indonesia, terutama di kawasan pedesaan. Temuan ini sama seperti dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti Samputra (2019) dan Sinaga et al., (2022). Pada sisi yang lain, anggaran bansos tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persentase kemiskinan di daerah perkotaan. Derajat pengaruh bantuan sosial pada persentase kemiskinan juga berbeda. Pengaruh paling besar terjadi pada persentase kemiskinan di desa (66 persen), lalu seluruh Indonesia (47 persen), dan persentase kemiskinan di kota (11 persen). Perbedaan pengaruh antara anggaran bantuan sosial kepada desa dan kota tidak lepas dari faktor sosial-ekonomi dan pengelolaan anggaran oleh pemerintah sendiri (Balvociute, 2020).

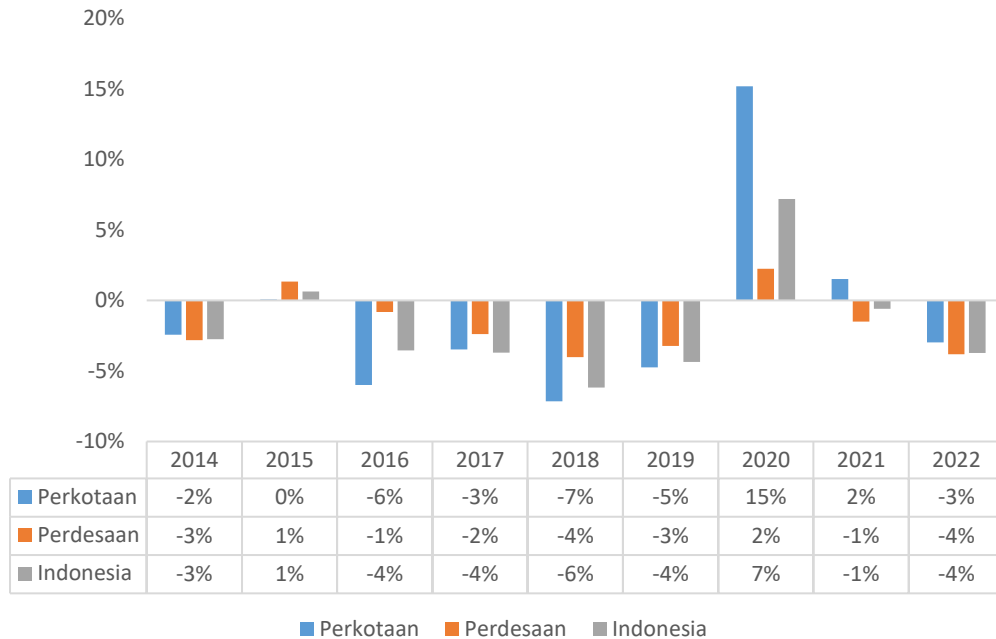
Tabel 3. Uji Regresi Variabel Bantuan Sosial pada Variabel Kemiskinan

Variabel	Coefficients	P-value	R Square
Kemiskinan di Desa	-0.00019677	0.013178	0.668421
Kemiskinan di Kota	-0.00008057	0.407431	0.116761
Kemiskinan di Seluruh Indonesia	-0.00019111	0.060083	0.471203

Sumber: BPS, 2023, diolah

Peran penting pemerintah dalam bentuk anggaran bantuan sosial yang bersumber dari pendapatan negara (salah satunya SBN) bisa dibidang sangat efektif membendung kenaikan jumlah warga miskin (Nyathi, et al., 2022). Pada masa pandemi 2020, angka kemiskinan melonjak tinggi. Kemiskinan di sektor perkotaan naik 15 persen, pedesaan 2 persen, dan Indonesia secara keseluruhan naik 7 persen. Berkat jumlah anggaran bansos yang dinaikkan, setidaknya persentase kemiskinan dapat diturunkan kembali pada tahun 2021 dan

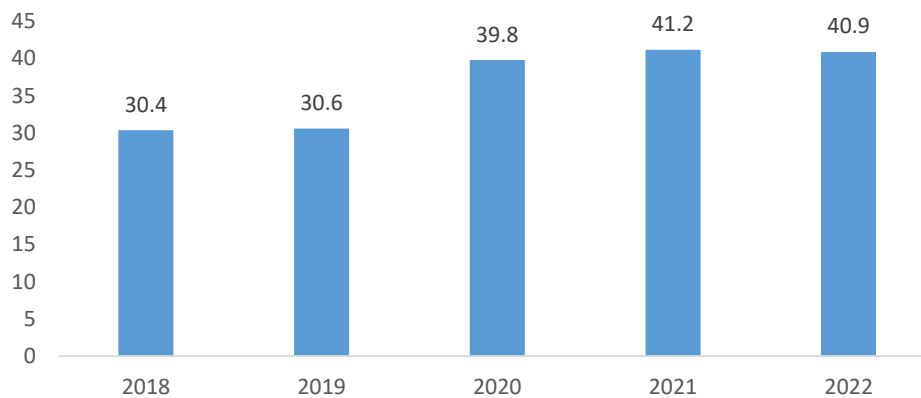
2022 (Tabel 3). Berdasarkan Gambar 7, progres persentase warga miskin di kota berkurang 1 persen pada tahun 2021 dan berkurang 4 persen pada tahun 2022. Hal serupa juga terjadi pada daerah pedesaan. Seperti yang diuraikan di awal analisa, pandemi sudah menimbulkan jumlah warga miskin dunia bertambah. Akan tetapi, seiring berkurangnya efek negatif dari virus Covid-19, ditambah peran aktif pemerintah, jumlah warga miskin dapat ditekan kembali. Dengan kata lain, kebijakan sosial berupa bantuan sosial adalah manajemen krisis terhadap khususnya, kondisi krisis pandemi.



Gambar 7. Progres Persentase Warga Miskin di Perkotaan, Pedesaan, dan Indonesia
 Sumber: BPS, 2023 diolah

4. Risiko Rasio Utang yang Berlebihan

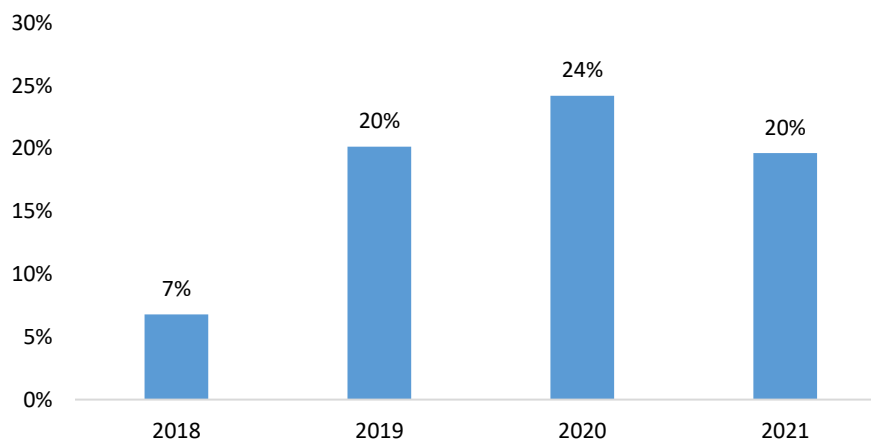
Pada bagian awal tulisan dijelaskan bahwa kenaikan SBN yang diterbitkan oleh pemerintah merupakan kebijakan pada masa krisis. Pemerintah telah menaikkan batas rasio utang agar dapat mendapat uang tambahan guna membantu masyarakat yang kesusahan. Meskipun kenaikan SBN pada masa normal maupun masa pandemi bisa menaikkan anggaran bantuan sosial dan akhirnya menurunkan persentase kemiskinan, pengampu kebijakan tetap harus waspada. Sikap waspada tersebut perlu ditingkatkan, sebab rasio kerentanan fiskal Indonesia mengalami pelemahan. Kerentanan pada bagian rasio fiskal yang mengalami kenaikan tersebut dapat dilihat dari dua indikator pada Gambar 8 dan Gambar 9. Gambar 8 menunjukkan rasio *Debt to GDP* yang naik dari 30 persen menjadi 40 persen pada masa pandemi. Meskipun masih di angka 40 persen atau masih di bawah batas regulasi yang berlaku (60 persen) dan standar IMF (64 persen), kenaikan utang perlu diperhatikan karena dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan. Karena jika tidak dikelola dengan memperhatikan risiko yang ada, maka utang yang bertambah akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan juga bisa menaikkan kerentanan sebuah negara (Caner, et al, 2010).



Gambar 8. Debt to GDP (%)

Sumber: BPS, 2023, diolah

Kenaikan belanja bunga terhadap pendapatan negara juga sama seperti *rasio debt to GDP*, yaitu sama-sama rentan. Pada tahun 2019, persentase belanja bunga terhadap pendapatan APBN hanya 7 persen. Angka tersebut naik menjadi tiga kali lipat saat pandemi tiba yaitu menjadi 24 persen (Gambar 9).



Gambar 9. Belanja Bunga terhadap Pendapatan

Sumber: BPS, 2023, diolah

Rasio fiskal yang rentan ini memicu kerentanan Indonesia seandainya perekonomian global mengalami fluktuasi. Fluktuasi tersebut bisa dipicu oleh rezim suku bunga tinggi yang secara langsung akan berdampak pada terjadi *capital outflow* atau asing membawa dananya keluar Indonesia, maka imbal hasil SBN akan kembali naik. Kenaikan imbal hasil perlu segera dilakukan untuk membuat investor tertarik untuk kembali menanamkan uangnya di dalam negeri. Bila imbal hasil naik dan, maka dampaknya harus ditanggung oleh fiskal dengan membayar bunga lebih tinggi. Selain itu, dampak berupa inflasi juga harus diperhatikan mengingat defisit fiskal akan memicu inflasi (Catao dan Terrones, 2005). Sehingga, kenaikan suku bunga dan inflasi betul-betul harus dimitigasi dampaknya, agar tidak menimbulkan *shock* terhadap APBN dan kondisi makro ekonomi merepresentasikan kondisi yang optimis (Acemoglu et al., 2003).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, kenaikan pemasukan pemerintah dari SBN dapat menaikkan jumlah anggaran bantuan sosial. Kemudian, pada penelitian ini juga didapatkan kesimpulan

bahwa kenaikan anggaran bantuan sosial dapat mengurangi persentase kemiskinan di Indonesia. Dengan kata lain, kebijakan bantuan sosial terbukti efektif menurunkan persentase kemiskinan di seluruh masyarakat, terutama masyarakat desa.

Pada masa pandemi, angka persentase kemiskinan mengalami kenaikan. Persentase kemiskinan penduduk kota naik 15 persen; desa 2 persen; Indonesia 7 persen. Kebijakan menaikkan jumlah pagu utang berimbang pada kelonggaran mencari pendapatan dari SBN memberi efek positif bagi upaya penurunan persentase warga miskin. Jumlah SBN yang naik signifikan pada masa pandemi telah menaikkan jumlah anggaran bantuan sosial. Anggaran bantuan sosial yang naik telah dapat mereduksi persentase kemiskinan di kota, desa, dan seluruh Indonesia.

Meskipun SBN dapat menurunkan persentase warga miskin di Indonesia, kewaspadaan terhadap rasio fiskal yang melemah juga harus ditingkatkan. Selain itu, optimalisasi program pengentasan kemiskinan pada wilayah kota harus disesuaikan lagi agar lebih efektif mengurangi kemiskinan penduduk kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., Simon Johnson, J. R., dan Thaicharoen, Y. (2003). *Institutional Causes and Macroeconomic Symptoms: Volatility, Crises, and Growth*. *Journal of Monetary Economics*. Volume 50, Issue 1, January 2003, Pages 49-123
- Ardagna, S. dan Caselli, Francesco. *The Political Economy of the Greek Debt Crisis: A Tale of Two Bailouts*. *American Economic Journal: Macroeconomics*. Vol. 6, No. 4 (October 2014), pp. 291-323 (33 pages)
- Asteriou, D., Pilbeam, K., dan Pratiwi, C. E. (2021). *Public Debt and Economic Growth: Panel Data Evidence for Asian Countries*. *Journal of Economics and Finance*, 45, 270–287. <https://doi.org/10.1007/s12197-020-09515-7>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,53%20persen%20pada%20September%202022> pada 1 Juni 2023.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Persentase Rencana Anggaran Untuk Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Pemerintah Pusat. Diakses dari (Persen). Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1611/sdgs_10/1 pada 1 Juni 2023.
- Balvociute, R. (2020). *Social Assistance for Poverty Reduction in the EU Countries: An Aspect of Socio-Economic Sustainability*. *European Journal of Sustainable Development*. 9(1), 469. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p469>
- Bank Indonesia (2023). Paparan Bank Indonesia: Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi Memajukan Perekonomian Nasional. Disampaikan pada *Fit and Proper Test* Komisi XI DPR RI. 20 Maret 2023.
- Barrientos, A. (2011). *Social Protection and Poverty*. *International Journal of Social Welfare*. Vol. 20, No. 3. pp. 240-249 <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2011.00783.x>

- Burnside, C. (2005). *Fiscal Sustainability in Theory and Practice: A Handbook*. World Bank. Washington DC
- Caner, Mehmet and Grennes, Thomas J. and Koehler-Geib, Fritzi N. (2010). Finding the Tipping Point - When Sovereign Debt Turns Bad. World Bank Policy Research Working Paper. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1612407> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1612407>
- Catao, L. A., dan Terrones, M. (2005). *Fiscal Deficits and Inflation*. *Journal of Monetary Elsevier*, vol. 52(3), pages 529-554, April.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko/DJPPR (2023). Paparan Evaluasi Kegiatan TA 2022 dan RKA RKA TA 2023 DJPPR. Disampaikan pada RDP dengan Komisi XI DPR RI. 2 Maret 2023.
- Dufrénot, G., Gente, K., dan Monsia, F. (2016). *Macroeconomic Imbalances, Financial Stress and Fiscal Vulnerability in The Euro Area Before The Debt Crises: A market view*. *Journal of International Money and Finance*, 67, 123–146
- Fournier, J.-M., Hisanaga, T., dan; Nguyen, A. D. M. (2022, August). *The Fiscal Stance in Japan*. *International Monetary Fund*. Retrieved April 8, 2023, <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2022/164/001.2022.issue-164-en.xml>
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid – 19 terhadap Prekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology, and Counseling*, 146-153
- Hutaria, T., Juanda, B., dan Purnamadewi, Y. L. (2021). *The Effect of Government Debt on Indonesia's Economics Growth*. *International Journal of Scientific Research in Science, Engineering, and Technology (IJSRSET)*, 6(5), 125–130.
- Juanda, B. dan Gladiola, S. (2022). Analisis Keberlanjutan Serta Pengaruh Surat Berharga Negara dan Faktor Lainnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 7(3), 239-254.
- Junaedi, D. (2018). Hubungan Antara Utang Luar Negeri dengan Perekonomian dan Kemiskinan: Komparasi Antar Rezim Pemerintahan. *Jurnal BPPK*, 563-387.
- Melati, A. M., Sudrajat, dan Burhany, D. I. (2021). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*.
- Mi, Y. (2008). *Social Assistance and Poverty Reduction in China*. *China Journal of Social Work*. Volume 1, 2008 - Issue 2, Pages 189-194. <https://doi.org/10.1080/17525090802109703>
- Normasyhuri, K., Budimansyah, dan Triyadi, E. (2022). Dampak Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Nyathi, L., Chinyakata, R. and Gwatimba, L. (2022). Social Protection Responsive Measures to Mitigate Adverse Socioeconomic Effects of COVID-19 in Southern Africa. Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 11-26. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-686-620221003>.

- Ryandini, T. (2014). Pengaruh Dana Investasi Melalui Instrumen SUN dan SBSN terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(1), 73–84. <https://doi.org/10.15408/aiq.v6i1.1369>
- Samputra, P. L. (2019). Efektivitas Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Nonparametrik. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*.
- Sinaga, E., Lubis, T., Situmorang, E., dan Harahap, A. (2022). Dampak Program Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Sumatra Utara. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(2), 116-131. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/jmp.v3i2.416>
- SMERU, 2021. Situasi Kemiskinan Selama Pandemi: The SMERU Research Institute. (2021, July 26). Retrieved April 9, 2023, from <https://smeru.or.id/id/article-id/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>
- Sumner, Andy; Ortiz-Juarez, Eduardo dan Hoy, Christopher. (2021). *Measuring Global Poverty Before and During The Pandemic: A Political Economy of Over-Optimism*. *Journal of Third World Quarterly*. Volume 43, 2022 - Issue. <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1995712>
- World Bank. 2021. Updated estimates of the impact of covid-19 on global poverty: Turning the corner on the pandemic in 2021? *World Bank Blogs*. (n.d.). Retrieved April 1, 2023, from <https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021>